

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Amrani, Hanafi, 2015, *Hukum Pidana Pencurian Uang: Perkembangan Rezim Anti-Pencucian Uang dan Implikasinya terhadap Prinsip Dasar Kedaulatan Negara, Yurisdiksi Pidana, dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta.

Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghieb, 2005, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang.

Bakhri, Syaiful, 2009, *Hukum Pembuktian: Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Total Media, Jakarta.

Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian ke-2*, PT Raja Grafindo, Persada, Jakarta.

Effendi, Erdianto 2011, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung.

Garnasih, Yenti, 2015, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok.

Hadikusuma, Hilman, 2005, *Bahasa Hukum Indonesia, Cetakan ke-3*, PT. Alumni, Bandung.

Harahap, M. Yahya, 2005, *Pembahasan Masalah dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali) Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2008, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hiariej, Eddy O.S., 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

- \_\_\_\_\_, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Kristiana, Yudi, 2015, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Cetakan 1, Thafa Media, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Prenadamedia, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2007, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung.
- Remmelink, Jan, 2003, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sakidjo, Aruan, dan Bambang Poernomo, 1990, *Hukum Pidana: Dasar Aturan Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sianturi, S. R., 1996, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta.
- Sjahdeidi, Sutan Remy, 2004, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme, Cetakan 1*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Soejono dan H. Abdurrahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Asdi Mahasatya, Jakarta.
- Soetarna, Hendar, 2011, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*, PT. Alumni, Bandung.
- Sofyan, Andi, dan Abd. Asis, 2014, *Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Sumardjono, Maria SW., 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sutedi, Adrian, 2008, *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, dan Kepailitan*, Cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta.

S. Tb. Irman, 2006, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang, Cetakan 1*, MQS Publishing, Bandung.

Terang, Titik, 1995, *KUHAP dan Penjelasannya*, Titik Terang, Jakarta.

Wiyono, R., 2014, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Cetakan 1*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yuhassarie, Emmy, 2005, *Tindak Pidana Pencucian Uang: Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Cetakan 1*, Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4324.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4191.

*United Nations Convention Against Illucit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1998.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan *Asas Ne Bis In Idem*.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 77/PUU-XII/2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 65/PUU-VIII/2010.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1261/K/Pid.Sus/2015.

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 125/Pid.Sus/TPK/2015/PN.SBY.

Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor: 11/PRAPER/2016/PN.SBY.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 30/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST.

Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 584/Pid.B/2013/PN.DPK.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 30/Pid.B-TPK/2012/PN.JKT.PST.

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 224/Pid.Sus/2013/PN.DPS.

DPR, Risalah Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Pembentukan Rancangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Pakar.

### **C. Karya Ilmiah, Jurnal dan Surat Kabar**

Atmasasmita, Romli, “Analisis Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Jurnal PJIH*, Vol. 3, No. 1, 2016.

Supriyadi Widodo Eddyono dan Yonatan Iskandar Chandra, “Mengurai Implementasi dan Tantangan Anti-Pencucian Uang di Indonesia”, *Institute for Criminal Justice Reform*, 2015.

Fitriadi Muslim dan Edi Nasution, *Menjerat Koruptor dengan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Hukum.

Hakim, Aji Lukmanul, “Tindak Pidana Pencucian Uang dan Modusnya Dalam Perspektif Hukum Bisnis”, *Jurnal De'Rechstaat*, Vol. 1, No. 1, 2015.

Nurmalawaty, “Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) dan Upaya Pencegahannya”, *Jurnal Equality*, Vol. 11, No.1, Februari 2006.

Rahman, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Tidak Mewajibkan Pembuktian Terlebih Dahulu Terhadap Tindak Pidana Asal”, *Tesis*, 2017, Universitas Gadjah Mada.

Serbabagus, Shalahudin, “Pembuktian Tindak Pidana Asal (*Predicate Crime*) Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Tesis*, 2005, Universitas Airlangga.

#### D. Internet

Hukum, Kanal, “Putusan Mahkamah Konstitusi No: 77/PUU-XII/2014 Tentang Uji Materi UU Nomor 8 Tahun 2010”, <http://kanalhukum.id/bedahkasus/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-77puu-xii2014-tentang-uji-materi-judicial-review-undang-undang-nomor-8-tahun-2010/11>, diakses tanggal 17 Januari 2018.

Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi, “Pengenalan Anti Pencucian Uang”, <http://elearning.ppatk.go.id>, diakses tanggal 24 Januari 2018.

Rasjid, Fajar Efendy, “Sidang Praperadilan Kadin Jatim, Saksi Ahli: Kasus Lama Tak Bisa Disidik Lagi”, [http://www.ubaya.ac.id/2014/content/news\\_detail/1735/Sidang-Praperadilan-Kadin-Jatim--Saksi-Ahli--Kasus-Lama-Tak-Bisa-Disidik-Lagi.html](http://www.ubaya.ac.id/2014/content/news_detail/1735/Sidang-Praperadilan-Kadin-Jatim--Saksi-Ahli--Kasus-Lama-Tak-Bisa-Disidik-Lagi.html), diakses tanggal 19 November 2018.

Sahbani, Agus, “PPATK Tegaskan TPPU Sebagai Independent Crime”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5612f12d4e884/ppatk-tegaskan-tppu-sebagai-independent-crime-i>, diakses pada 17 Januari 2018.

Supandji, Hendarman, “Pengungkapan dan Pembuktian Perkara Pidana Melalui Penelusuran Hasil Kejahatan”, <https://www.kejaksaan.go.id/pidato.php?idu=1&id=14>, diakses tanggal 20 November 2018.

Win, “Hakim Kabulkan Gugatan Praperadilan Kadin Jatim”, <http://kanalsatu.com/id/post/48080/diar-kusuma-putra--tko--maruli-hutagalung>, diakses tanggal 19 November 2018.

#### **E. Wawancara**

Erianto, “Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asalnya oleh Kejaksaan”, *Wawancara*, 31 Juli 2018, Jakarta.

Nurhidayat, Syarif, “Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asalnya”, *Wawancara*, 20 November 2018, Yogyakarta.

Sugianto, Eko, “Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asalnya”, *Wawancara*, 6 Agustus 2018, Jakarta.